

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem untuk mengelola pencatatan PNBP yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Salah satu bagian dari sistem MPN adalah Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP. Pengimplementasian SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PNBP terbukti sangat membantu Kementerian dan Lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pertama SIMPONI telah merubah proses bisnis pembayaran dari uang tunai menjadi cashless dengan penyediaan fasilitas EDC yang ditawarkan. Akibatnya, resiko memegang uang tunai (seperti kehilangan atau salah hitung) dapat berkurang sehingga perhitungan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Kedua, dengan sistem online pelayanan bisa berjalan 24 jam sesuai dengan tuntutan pengguna layanan satkernya. Ketiga, instansi yang dipimpinnya juga tidak lagi direpotkan dengan penatausahaan pembayaran karena data penerimaan sudah tersedia melalui SIMPONI yang sudah ada pada tahun 2014. Penyediaan sistem pembayaran online ini hanyalah salah satu contoh dari berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan good governance. (Tantri, 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur

pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh salah satunya dari Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak hanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Salim, 2014)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2018 adalah Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dikelola dalam sistem APBN. (Putri, 2018).

Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang bahwa kelompok semua orang atau kelompok dalam sebuah organisasi sudah pasti memiliki tujuan dan pandangan masing-masing dari kerjanya dalam organisasi. Mereka bersaing untuk mencapai kepentingannya masing-masing dalam organisasi tersebut. Hal ini juga ditandai dengan perbedaan yang ada mengenai segala macam sifat dalam anggota organisasi. Perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perselisihan paham antara para anggota organisasi. Perselisihan paham ini dinamakan konflik. Konflik ini bisa muncul secara terus menerus apabila manajer dalam organisasi tersebut tidak bisa menciptakan situasi sepuas dalam semua anggota organisasi. Konflik tidak dapat dihindari dalam suatu organisasi karena disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan yang datangnya dari dalam sifat manusia. Sifat manusia ini bukanlah hal yang dengan mudah bisa diubah. Munculnya konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Perubahan ini dapat terjadi apabila manajer mengadakan evaluasi terhadap perbedaan pandangan antar elemen-elemen organisasi. Evaluasi ini bisa menimbulkan berbagai kesimpulan dan ditemukannya cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat dari konflik yang terjadi. Penemuan cara-cara baru ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Apabila konflik yang ada bisa dikembangkan menjadi hal tadi maka munculnya konflik bisa berdampak positif terhadap organisasi. (Kayati, 2016)

Beberapa waktu lalu, muncul pemberitaan di suatu situs berita online yang memberikan kesan bahwa regulasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan menghambat penerapan pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis IT di salah satu Kementerian/Lembaga. Walaupun demikian, pada kenyataannya efektivitas pencatatan PNBP dengan menggunakan sistem MPN masih dipertanyakan. Hal tersebut terutama terkait dengan masih sering ditemukannya ketidaklengkapan elemen data pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang akan ditatausahakan KPPN. Optimalisasi pengelolaan PNBP perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PNBP. Namun dari laporan hasil pemeriksaan BPK masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PNBP yang menjadi temuan BPK. Diantaranya, masih ditemukan PNBP yang terlambat/belum setor, kurang/belum dipungut dan digunakan langsung diluar mekanisme. Dalam menanggapi hal tersebut Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung akan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan fungsi teknis registrasi dan identifikasi (regident) baik SIM, STNK, dan BPKB guna pengoptimalisasian penysetoran PNBP berbasis *online* agar lebih aman cepat, tepat dan akurat. Kasubdit Regident Polda Lampung, AKBP Mohamad Syarhan, SIK., MH. mengatakan, peningkatan kemampuan fungsi teknis registrasi dan identifikasi (regident) itu akan dilakukan dengan Dirjen Anggaran karena sistem

tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal. "Pada intinya untuk melakukan Pemantapan Implementasi SIMPONI Dalam Pembayaran/Penyetoran PNPB harus ada pelatihan terlebih dahulu agar para pegawai nantinya dapat mengoptimalkan sistem tersebut. Oleh karena itu Dirjen Anggaran juga sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala guna pemahaman dalam penggunaan sistem tersebut,"ujarnya. (<http://lampung.tribunnews.com>)

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kayati (2016) menguji pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, Penelitian ini menemukan adanya pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhra (2012), menguji pengaruh faktor organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) di Pemda Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh Pelatihan, Dukungan Atasan, Perencanaan Sistem, dan Pengalaman Kerja terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kayati (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kayati (2016) adalah *pertama*, dalam penelitian sebelumnya variabel Independent yang digunakan ada 3 (tiga) variabel terdiri dari Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan sedangkan dalam penelitian ini ada penambahan Variabel Independen yang di dapat dari penelitian zuhra (2012) yaitu variabel Pengalaman Kerja dikarenakan pengalaman kerja dapat mempengaruhi perkembangan sistem yang ada pada saat ini. *Kedua*, sistem yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Sistem Informasi PNPB Online. Hal ini dikarenakan Sistem PNPB masih terbilang baru sehingga

penulis tertarik untuk melakukan kajian berjudul **“Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Informasi PNBP Online (Studi kasus pada Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi: Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: hanya pada lingkup seputar kegiatan berperilaku organisasi dalam implementasi sistem informasi PNBP *online*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh faktor perilaku organisasi seperti pelatihan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*?
2. Apakah terdapat pengaruh faktor perilaku organisasi seperti kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor perilaku organisasi seperti dukungan atasan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*?
4. Apakah terdapat pengaruh faktor perilaku organisasi seperti pengalaman kerja terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*?

1.4. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Informasi PNBP Online. Lebih khusus, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan tujuan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dukungan atasan terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman kerja berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara *online*.

1.5. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan sistem Informasi PNBP secara Online.
2. Bagi pihak Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan. Terutama yang berhubungan dengan Sistem informasi PNBP dengan faktor berperilaku Organisasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perilaku organisasi, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berusaha menguraikan deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan dan saran-saran dari penulis.

